



DINAS SOSIAL

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 - 2022



Kami Peduli ... Go !!!

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022

Diterbitkan oleh :

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. Gunung Sahari II/6 Jakarta Pusat

Edisi pertama © 2018 Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
dalam bentuk dan cara apapun tanpa ijin tertulis

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA LINGKUP HAK CIPTA Pasal 2 (1) KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (1) dan (2)

Desain dan Tata Letak :

Eko Purnomo, S.Sn.

Hak Penerbitan :

Warna Media Kreasindo

Jl. H. Jabir No. 88b, Rempoa, Jakarta Selatan

Ph. 08211 3344 062

Penanggungjawab & Penulis :

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Kami Peduli ... Go !!!

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022. Revisi Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 penting dilakukan mengingat ada perubahan tata kerja Dinas Sosial, pelimpahan sebagian kewenangan Dinas Sosial kepada Suku Dinas Sosial serta adanya kebijakan penggabungan program dan kegiatan. Dokumen Rencana Strategis merupakan hal yang sangat penting bagi Dinas Sosial untuk memberikan arah pembangunan kesejahteraan sosial lima tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis merupakan hal yang sangat penting bagi Dinas Sosial untuk memberikan arah pembangunan kesejahteraan sosial lima tahun kedepan. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program, Kegiatan dan Indikator kinerja yang akan dicapai serta rencana kebutuhan anggaran sesuai target yang ditetapkan. Selain itu dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam menangani permasalahan sosial di DKI Jakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017 – 2022. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta dapat terwujud.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

TTD

Irmansyah
NIP. 196601121987101001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya

Jakarta, Desember 2016
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
(Periode 12 Februari 2014 s.d 05 Juli 2018)

TTD

Drs. Masrokhon, M.Si.
NIP. 195910121990091001

Daftar isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 : PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial	24
2.3. Kinerja Pelayanan	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	38
BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	40
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	44
3.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB 6 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	60
BAB 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
BAB 8 : Penutup	84

DAFTAR TABEL

Rekapitulasi berdasarkan tingkat pendidikan	25
Tabel Rekapitulasi berdasarkan jenjang Pangkat Pegawai Negeri Sipil	25
Rekapitulasi berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural/ Jabatan Pelaksana	26
Rekapitulasi berdasarkan persebaran dan rencana kebutuhan atas Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pekerja Sosial.....	26
Rekonsiliasi Aset Dinas Sosial	26
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	32
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	37
Pemetaan Permasalahan Dinas Sosial	29
Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan Pelayanan Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur	44
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	50
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	60
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah	3
Gambar Diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan	5
Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial	18
Gambar Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah	42
Gambar Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable development Goals (TPB/SDGs)	45
Gambar Isu Strategis yang mempengaruhi penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Sosial	46
Dokumen dalam Foto	85

Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan amanat tersebut kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan dibedakan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren itulah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah ¹, dimana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

¹ Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH , Paradigma baru pembangunan daerah



Gambar 1.1

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan di bidang sosial merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh karena itu diperlukan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewajiban melakukan penyusunan kembali rencana strategis untuk tahun 2017-2022 sebagai kelanjutan dari rencana strategis sebelumnya sebagai upaya dalam mengatasi masalah sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang semakin kompleks melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal.

1.1. Latar Belakang

Berbagai masalah sosial yang terjadi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebabkan antara lain derasnya migrasi, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan sosial, yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan berkembang berbagai penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, dan melindungi warga masyarakat dari kerawanan sosial.

Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan sosial melakukan penyusunan kembali rencana strategis Dinas Sosial sebagai kelanjutan dari rencana strategis sebelumnya, dimana Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022.

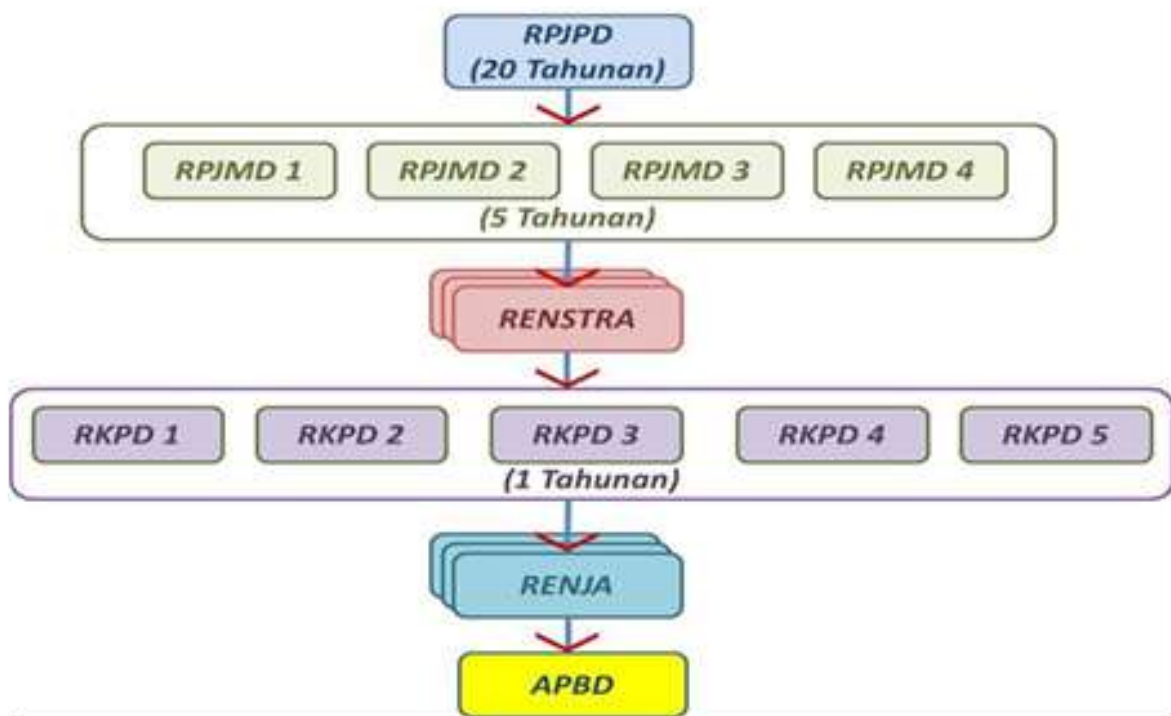
Fungsi Renstra Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial meliputi beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra.

Hubungan Antara Rencana Strategis Dinas Sosial dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksana pembangunan yang secara singkat dapat diuraikan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar I.2

Diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

42. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
44. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana ;
46. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
47. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera;
48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
49. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
50. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
51. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
52. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
53. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial;
54. Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
55. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
56. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
57. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana (Berita Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013).
58. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509)
59. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
60. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Migran Bermasalah (PMB).
61. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.;
62. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

63. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial.
64. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
65. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana strategis Kementerian Sosial 2015-2019;
66. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
67. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
69. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
70. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24);
71. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22);
72. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
73. 73. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
74. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

75. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5001);
76. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
77. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
78. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
79. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
80. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar;
81. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
82. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
83. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2015 tentang Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan dan/atau Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum;
84. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;
85. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial Tahun 2017-2022.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Sebagai acuan Unit Kerja Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) serta bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. dan
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Format penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai perangkat daerah pelaksana urusan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1. Pada Bab ini menguraikan informasi atas amanat dan tanggungjawab Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, dasar hukum, metode penyusunan, hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dan sistematika penulisan rencana strategis Dinas Sosial.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2. Pada Bab ini menguraikan informasi atas gambaran pelayanan Dinas Sosial meliputi gambaran kedudukan, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan gambaran pembagian kewenangan antara Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

3. Pada Bab ini menguraikan informasi mengenai permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4. Pada Bab ini menguraikan informasi tentang tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial beserta sasarannya dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang sosial

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5. Pada Bab ini menguraikan informasi mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

6. Pada Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial pada Tahun 2017-2022

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

7. Pada Bab ini menguraikan informasi tentang pelaksana tugas, fungsi dan penyelenggaraan urusan dilingkungan Dinas Sosial meliputi Bidang Teknis, Suku Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bab VIII Penutup

- 8.

Bab II

Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan dinas perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial pada periode sebelumnya telah dapat dicapai beberapa hal diantaranya adalah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik di dalam panti sosial maupun diluar panti melalui pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan pemenuhan penanganan bencana dan korban bencana dengan respon time selama 3 (tiga) jam.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan fungsi, susunan organisasi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Fungsi Dinas Sosial, meliputi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan sosial;
4. Pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan di bidang sosial;

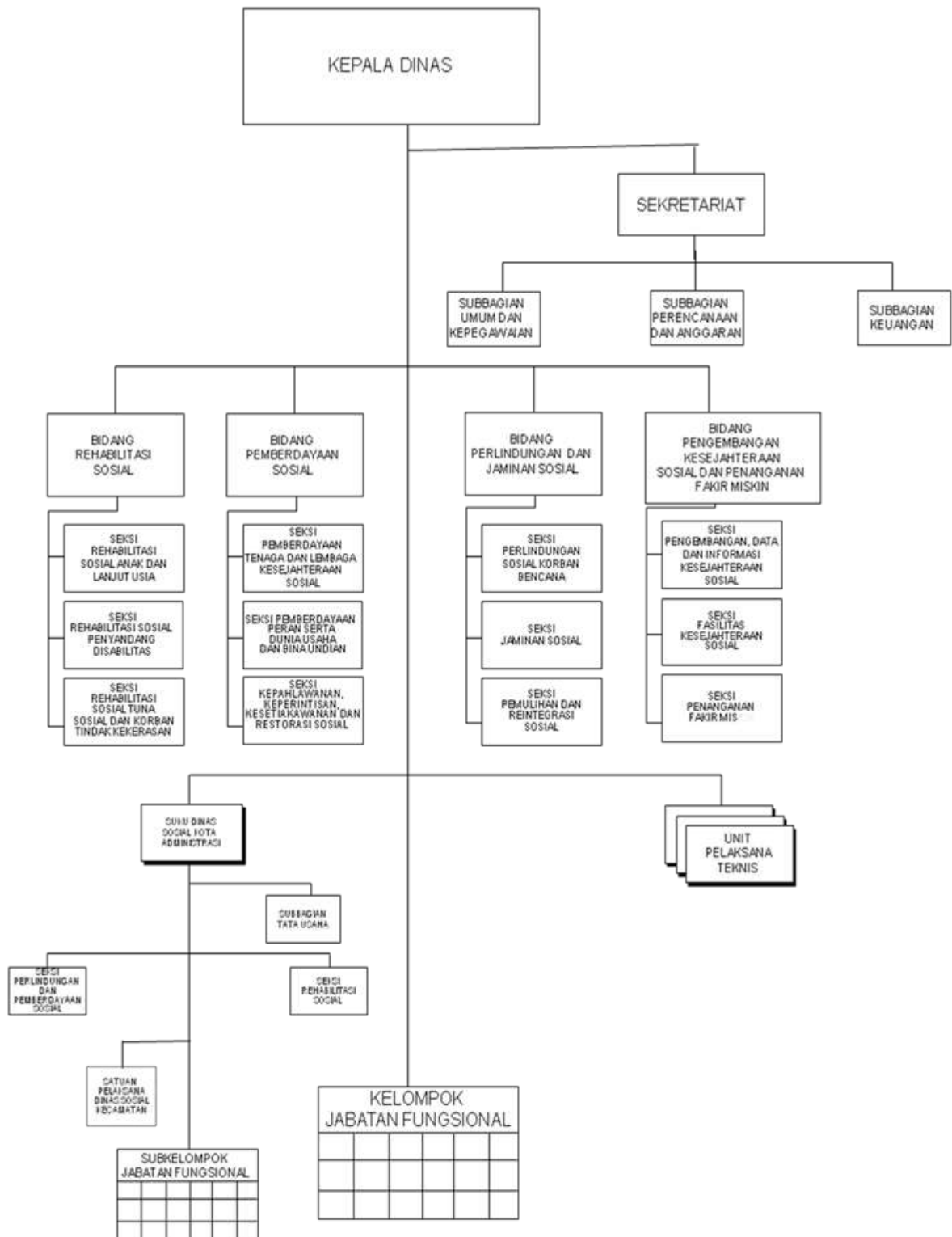
5. Pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan korban tindak kekerasan;
6. Pengendalian, penjangkauan, penyaluran dan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial;
8. Pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
10. Pelayanan penghargaan kepada pahlawan, perintis kemerdekaan dan masyarakat;
11. Pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
12. Pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial orang terlantar;
13. Perlindungan sosial korban bencana dan korban musibah sosial lainnya;
14. Pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial;
15. Pelaksanaan dan pengembangan program penanganan fakir miskin;
16. Pembinaan penyelenggaraan Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan/atau barang;
17. Pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
18. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
19. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang sosial;
20. Pendataan, pengolahan, pemutakhiran data kesejahteraan sosial dan pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin;
21. Publikasi data dan penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial;
22. Pelaksanaan promosi kesejahteraan sosial;
23. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial;
24. Pengelolaan panti sosial dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
25. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial;
26. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
27. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Sosial;
28. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Sosial;
29. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Sosial; dan
30. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

b. Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Peran Serta Dunia Usaha dan Bina Undian;
 - b. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemulihan dan Reintegrasi Sosial.
6. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan, Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
7. Suku Dinas Kota Administrasi;
8. Unit Pelaksana Teknis;
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
 - b. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, yang terdiri dari:
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, yang terdiri dari:
 1. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender; dan
 2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Duren Sawit
 - c. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;
 - d. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, yang terdiri dari:
 1. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Tebet; dan
 2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3;
 - f. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
 - g. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia;
 - h. Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih;
 - i. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya;
 - j. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, yang terdiri dari dari :

- i. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, yang terdiri dari:
 - 1. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung;
 - 2. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Ciracas;
- j. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, yang terdiri dari:
 - 1. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Cengkareng;
 - 2. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar.
- k. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3;
- l. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4.
- m. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya, yang terdiri dari:
 - Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
 - Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2
- n. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin;
- o. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih;
- p. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, yang terdiri dari:
 - 1. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1;
 - 2. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, yang terdiri dari:
 - Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung;
 - Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Budi Murni
 - 3. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.
- q. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, yang terdiri dari:
 - Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, yang terdiri dari:
 - Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya;
 - Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Cengkareng;
 - Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2
- 9. Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- 10. Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH. Hasyim As'ari.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Umum;
 - 2. Jabatan Fungsional Tertentu, yang terdiri dari:
 - a. Pekerja Sosial; dan
 - b. Penyuluh Sosial.

c. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial



c. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknidan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial

2. Sekretariat merupakan unit kerja staf Dinas Sosial yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial oleh unit kerja Dinas Sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi internal Dinas Sosial;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas Sosial;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Sosial;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Sosial;
- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Sosial;
- k. pengelolaan kearsipan;
- l. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas Sosial;
- m. fasilitasi pelaksanaan urusan sosial yang tidak dilimpahkan ke Kabupaten Administrasi;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Sosial; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial
- d. pencegahan dan penanganan permasalahan sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- e. pelaksanaan registrasi, identifikasi dan asistensi pelayanan sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- f. pelaksanaan perencanaan anggaran belanja bantuan sosial anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- g. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi data anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- h. pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengangkatan anak dan izin pengasuhan anak;
- i. pelayanan rekomendasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
- j. pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- k. pengoordinasian dan pembinaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tunasosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- m. pengoordinasian dan kerjasama pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti sosial dan non panti sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan; dan

- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial dan pembinaan penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang dan/atau barang.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pemberdayaan sosial;
- d. pelaksanaan registrasi, identifikasi dan asistensi peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, pahlawan, perintis kemerdekaan dan masyarakat serta Undian dan Pengumpulan uang dan/atau barang;
- e. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, advokasi dan pendampingan sosial pemberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, pahlawan, perintis kemerdekaan dan masyarakat;
- f. pelaksanaan perencanaan anggaran belanja hibah/bantuan sosial lembaga kesejahteraan sosial;
- g. pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan pemberdayaan peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, tanda kehormatan dan pelaksanaan restorasi sosial serta penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang dan/atau barang;
- h. pelaksanaan pemberdayaan peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa dan tanda kehormatan serta pelaksanaan restorasi sosial;
- i. pengembangan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
- j. pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang dan/atau barang;
- k. pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- l. pengoordinasian dan kerjasama pelayanan sosial di Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid Raya KH.Hasyim Asy'ari;
- m. pelaksanaan pendataan dan verifikasi data peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, tanda kehormatan dan pelaksanaan restorasi sosial serta penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang dan/atau barang;

- n. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan peran serta dunia usaha, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, penganugerahan gelar pahlawan, tanda- jasa, tanda kehormatan dan pelaksanaan restorasi sosial serta penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang dan/atau barang; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana, Orang Terlantar dan pemberian jaminan dan bantuan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial orang terlantar dan korban bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana, Orang Terlantar dan pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- f. pelaksanaan registrasi dan identifikasi korban bencana, orang terlantar dan pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- g. pelaksanaan pendataan dan verifikasi data korban. bencana, Orang Terlantar dan penerima jaminan dan bantuan sosial;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi jaminan Sosial Nasional;
- i. pengembangan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana, Orang Terlantar, dan pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- j. pengembangan pelatihan tenaga perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana, Orang Terlantar dan pemberian jaminan dan bantuan sosial;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perlindungan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana, Orang Terlantar dan pemberian jaminan dan bantuan sosial; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

6. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan, data dan informasi, pengembangan fasilitas kesejahteraan sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan sosial;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penyajian, penyebaran informasi, publikasi dan pemeliharaan data dan informasi bidang sosial;
- f. pengelolaan teknologi informasi bidang sosial;
- g. perencanaan, pelaksanaan rehab dan pengembangan fasilitas pelayanan;
- h. pelaksanaan bimbingan, pelatihan, konsultasi, advokasi dan pendampingan sosial dalam lingkup penanganan fakir miskin; pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran mandiri data terpadu program penanganan fakir miskin;
- i. pelaksanaan pengembangan kerja sama, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pelayanan, data dan informasi, pengembangan fasilitas kesejahteraan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

7. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial pada lingkup wilayah Kota Administrasi.

Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
- d. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- e. penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset Suku Dinas Kota serta barang milik negara;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. pencegahan dan rehabilitasi sosial PMKS;

- h. pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan peran serta dunia usaha;
- i. pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- j. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran mandiri data terpadu program penanganan fakir miskin;
- k. pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. penggalangan peran serta masyarakat;
- m. pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan musibah sosial lainnya serta jaminan kesejahteraan sosial;
- n. pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial; pelaksanaan promosi kesejahteraan sosial;
- o. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Dinas Kota, SKKT, gudang logistik dan LK3;
- p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- r. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
- t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;
- u. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;
- v. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- w. penyiapan bahan laporan Dinas Sosial yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- x. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Sosial dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Sosial

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia meliputi:

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Aparatur Sipil Negara;

Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial per Februari 2018 sejumlah 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) Orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rekapitulasi berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Strata 3 (S3)	1	
2	Strata 2 (S2)	85	
3	Strata 1 (S1)	208	
4	Diploma	13	
5	SMA	365	
6	SLTP	49	
7	SD	32	

b. Rekapitulasi berdasarkan Jenjang Pangkat Pegawai Negeri Sipil

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina (Golongan IV)	83	
2	Penata (Golongan III)	361	
3	Pengatur (Golongan II)	259	
4	Juru (Golongan I)	50	

c. Rekapitulasi berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural/ Jabatan Pelaksana

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1	
3	Eselon III	33	
4	Eselon IV	56	
5	Eselon V	-	
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	23	
7	Jabatan Pelaksana (staf)	640	

d. Rekapitulasi berdasarkan persebaran dan rencana kebutuhan atas Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pekerja Sosial

No	Unit Kerja	Jumlah JFT Peksos (orang)	Rencana Kebutuhan (orang)
1	Dinas Sosial	1	2
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	2	8
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama	6	34
4	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti	-	10
5	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia	1	9
6	Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih	2	8
7	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	-	10
8	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia	4	36
9	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya	2	18
10	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	1	9
11	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	-	10
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa	4	26
13	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya	1	19

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

a. Masyarakat

1. Pendamping sosial Usaha Ekonomi Produktif dan kelompok usaha bersama;
2. Pendamping sosial program keluarga harapan;
3. Pendamping sosial lanjut usia;
4. Pendamping sosial anak;
5. Pendamping sosial penyandang disabilitas;
6. Pendamping sosial orang dengan human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome;
7. Pendamping sosial korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
8. Pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;
9. Pendamping sosial bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
10. Pendamping sosial eks wanita tuna susila;
11. Pendamping bantuan sosial pangan;
12. Petugas sosial pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)/ penanganan fakir miskin;
13. Petugas pencacah lapangan Mekanisme pemutakhiran Mandiri (MPM);
14. Petugas sosial kesiapsiagaan bencana;
15. Petugas pelayanan kesejahteraan sosial (pramu sosial) dalam Panti Sosial;
16. Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S);
17. Pekerja Sosial
18. Relawan Sosial yang terdiri atas:
 - a. Pekerja sosial masyarakat;
 - b. Karang taruna;
 - c. Tenaga pelopor perdamaian;
 - d. Taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. Kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. Kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. Penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
19. Penyuluh Sosial

2.2.2. Aset

a. Aset

Rekonsiliasi Aset Dinas Sosial sebagai berikut:

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Tahun 2018	Pengurangan Tahun 2018	Saldo per 2018	Ket
I	Aset Tetap					
1.	Tanah	43,276,451,500	228,900,000,000	228,900,000,000	43,276,451,500	
2.	Peralatan dan Mesin	16,546,656,258	334,637,890	974,496,466	15,906,797,682	
3.	Gadung dan Bangunan	43,815,992,861	0	0	43,815,992,861	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
5.	Aset Tetap Lainnya	206,047,153	0	0	206,047,153	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1,557,633,732	0	0	1,557,633,732	
	Total Aset Tetap	106,402,781,504	229,234,637,890	229,874,496,466	104,762,922,928	
II	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,020,737,574)	0	0	(15,020,737,574)	
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23,554,863,495)	0	0	(23,554,863,495)	
9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(200,327,153)	0	0	(200,327,153)	
	Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(38,775,928,222)	0	0	(38,775,928,222)	
III	Aset Lain-Lain					
11.	Aset Tidak Berwujud	158,776,900	0	0	158,776,900	
12.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(158,776,900)	0	0	(-158,776,900)	
13.	Aset Rusak Berat	6,823,826,478	96,700,000	0	6,920,526,478	
14.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(1,375,559,757)	0	0	(-1,375,559,757)	
15.	Aset Belum Validasi	0	0	0	0	
16.	Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0	0	0	0	
17.	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya	0	0	0	0	
18.	Aset Fasos Fasum	0	0	0	0	
19.	Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum	0	0	0	0	
20.	Kas Dikonsinyasikan	0	0	0	0	
21.	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	0	0	0	0	
22.	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Operasi (KSO)	0	0	0	0	
23.	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (BOT)	0	0	0	0	
24.	Akumulasi Penyusutan BOT	0	0	0	0	

b. Unit Layanan

Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial di lingkungan Dinas Sosial maka dapat dibentuk unit layanan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan, meliputi:

1. Taman Asuhan Anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
2. Sasana Asuhan Anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
3. Sasana Bina Daksa dan Loka Bina Karya pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti;
4. Rumah Perlindungan dan Rumah Aman pada Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih;
5. Rumah Tuna Wisma dan Tuna Karya pada Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya;
6. Sasana Tresna Werdha pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;
7. Sasana Bina Laras dan Unit Informasi Layanan Sosial pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa

2.3. Kinerja Pelayanan

Pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2013-2017 ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan SKPD pelayanan Sosial;
- b. Terpenuhinya regulasi, prasarana dan sarana serta sistem informasi kesejahteraan sosial;
- c. Meningkatkan bantuan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada PMKS;
- d. Menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, Dinas Sosial memiliki program dan Indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan Indikator meliputi:
 - a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. Persentase PMKS yang dapat ditampung di Panti Sosial;
 - c. Persentase PMKS dijalanan;
 - d. Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, dengan Indikator kinerja Program :
 - a. Jumlah gedung panti sosial yang layak;
 - b. Jumlah gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan;

3. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan indikator kinerja program:
 - a. Jumlah lembaga sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial;
 - b. Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial;
 - c. Persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta;
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial, dengan indikator kinerja program:
 - a. Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri;
 - b. Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri
5. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator kinerja program:
 - a. Respon time penanggulangan bencana;
 - b. Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial;
 - c. Jumlah PMKS non potensial yang mendapatkan jaminan sosial.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran target Rencana Strategis periode sebelumnya disajikan dalam bentuk tabel pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2013-2017 berdasarkan skala nilai peringkat kerja sebagaimana diatur lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikategorikan dalam skala “sedang” dimana rata-rata pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

Interprestasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial diantaranya meliputi:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan Program dan Rehabilitasi Sosial diinterpretasikan masuk ke dalam skapencapaian kinerja yang rendah, dimana terdapat pencapaian untuk tahun ke ketiga, keempat dan kelima pada skala 0% (nol persen) sebagai dampak perubahan kebijakan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial khususnya pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada masyarakat sehingga berdampak pada tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan atas rencana strategis.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana sosial
Pelaksanaan Program peningkatan sarana dan prasarana sosial masuk ke dalam skala pencapaian kinerja yang sedang dimana terdapat pencapaian indikator yang dapat mencapai 100% (seratur persen) akan tetapi terdapat beberapa indikator yang hanya mencapai 68 % (enam puluh delapan persen) dikarenakan lokasi sarana dan prasarana sosial berada pada lokasi dan kondisi permasalahan yang berbeda sehingga dilaksanakan pencapaian melalui skala prioritas.

3. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pelaksanaan program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masuk ke dalam skala pencapaian kinerja yang sedang dengan indikator jumlah lembaga dan tenaga kesejahteraan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial pada tahun keempat dan kelima rencana strategis mengalami penurunan pencapaian mengingat terdapat perubahan kebijakan diantaranya pelimpahan kewenangan pemberian ijin dan rekomendasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pembagian zona pada tata ruang wilayah.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan peningkatan Pemberdayaan Sosial masuk ke dalam skala pencapaian kinerja yang sedang dengan indikator jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri dan pada tahun keempat dan kelima rencana strategis mengalami penurunan pencapaian mengingat terdapat perubahan kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan diantara penggunaan data terpadu penanggulangan kemiskinan dan pada indikator Jumlah Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan keluarga pahlawan yang menerima jaminan sosial terdapat penurunan pencapaian target hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan pada jumlah perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan.

5. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan program pelayanan perlindungan dan jaminan sosial masuk ke dalam skala pencapaian kinerja yang sangat tinggi dimana seluruh indikator dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial dapat tercapai sesuai dengan target kinerja.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	85%	43%	55%	65%	75%	85%	30%	30%	14%	0	0	70%	55%	21%	0%	0%
2	Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	11,500 Orang	8,604 Orang	9,464 Orang	10,410 Orang	11,000 Orang	11,500 Orang	3,820 Orang	3,100 Orang	3,210 Orang	0	0	44%	33%	31%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Jumlah anak penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu fisik	-	-	2,600 Orang	0	650 Orang	650 Orang	650 Orang	650 Orang	0	357 Orang	259 Orang	0	0	0%	55%	40%	0%	0%
4	Jumlah lanjut usia terlanjar yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	9,289 Orang	3,273 Orang	4,250 Orang	5,525 Orang	7,200 Orang	9,289 Orang	3,565 Orang	4,250 Orang	285 Orang	0	0	109%	100%	5%	0%	0%
5	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan alat bantu fisik	-	-	2,500 Orang	300 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	132 Orang	625 Orang	0	0	0	44%	114%	0%	0%	0%
6	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	520	173	225	300	400	520	200	300	0	0	0	116%	133%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu fisik	-	-	4,350 Orang	250 Orang	1,025 Orang	1,025 Orang	1,025 Orang	1,025 Orang	433 Orang	907 Orang	217 Orang	0	585 Orang	173%	88%	21%	0%	57%
8	Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial	-	-	15.2%	14.4%	14.5%	14.7%	15%	15.2%	14.2%	14.5%	15.4%	17.4%	17.7%	99%	100%	105%	116%	116%
9	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan dan perlindungan di panti Sosial	-	-	5,285 Orang	5,580 Orang	5,600 Orang	5,700 Orang	5,800 Orang	5,900 Orang	5,502 Orang	5,602 Orang	5,973 Orang	6,816 Orang	7,614 Orang	99%	100%	105%	118%	129%
10	Persentase PMKS jalanan	-	-	5%	75%	50%	25%	10%	5%	75%	50%	25%	10%	5%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah titik rawan PMKS jalanan di wilayah DKI Jakarta	-	-	0	35 titik	22 titik	15 titik	8 titik	0	35 titik	22 titik	15 titik	8 titik	0	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS	-	-	1	0	1	Implem entasi	Implem entasi	Implem entasi		0	1	Implem entasi	Implem entasi	Implem entasi		100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah Gedung Pantti Sosial yang layak	-	-	27	19	22	24	25	27		19	20	22	22	23		100%	91%	92%	88%	85%
14	Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial	-	-	2,209	662	1016	1500	2000	2209		662	1016	1502	1502	1502		100%	100%	100%	75%	68%
15	Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial	-	-	21,652	7578	11000	14000	17000	21652		7640	11000	13987	13987	13987		101%	100%	100%	82%	65%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri	-	-	96.951	15000	30000	50000	70000	96951		14394	15094	18084	19694	22724		96%	50%	36%	28%	23%
17	Persentase Korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
18	Respon time penanggulangan bencana	-	-	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam		3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam		100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah PK/JPk dan Keluarga Pahlawan yang menerima jaminan sosial	-	-	212 Orang	212 Orang	212 Orang	212 Orang	212 Orang	212 Orang		212 Orang	212 Orang	181 Orang	161 Orang	150 Orang		100%	100%	85%	76%	71%
RATA - RATA CAPAIAN = 72,72%																					

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Kondisi Anggaran Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO.	TAHUN	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG			JUMLAH ANGGARAN BL	TOTAL
			DINAS SOSIAL	SUDIN SOSIAL	PANTI SOSIAL		
1	2013	Rp99,300,239,215	Rp208,037,754,000	Rp94,974,983,168	Rp137,599,781,121	Rp440,612,518,289	Rp539,912,757,504
2	2014	Rp119,048,143,000	Rp213,295,069,120	Rp158,971,273,773	Rp164,135,110,511	Rp536,401,453,404	Rp655,449,596,404
3	2015	Rp214,397,929,050	Rp91,108,751,008	Rp107,938,928,389	Rp207,099,054,832	Rp406,146,734,229	Rp620,544,663,279
4	2016	Rp257,370,971,545	Rp21,550,605,495	Rp26,517,302,518	Rp213,401,811,207	Rp261,469,719,220	Rp518,840,690,765
5	2017	Rp241,301,581,220	Rp43,528,107,643	Rp36,757,213,813	Rp179,761,015,767	Rp260,046,337,223	Rp501,347,918,443

Sumber data : Subbagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Pengembangan Pelayanan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial diantaranya:

a. Koordinasi dan Kerjasama

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial telah mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dimana kewajiban Pemerintah Daerah tersebut secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat maka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang cukup berpengaruh terhadap layanan kesejahteraan sosial sehingga pelayanan yang ada bukan saling tumpang tindih, melainkan saling menguatkan dan melengkapi kebutuhan dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial sesuai dengan standar minimal prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.

Setiap program layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta merupakan

c. upaya membangun kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat. Pelibatan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan di masyarakat menjadi hal yang signifikan jika dilakukan secara berkelanjutan dimana pemahaman masyarakat harus dikuatkan tentang kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan bermasyarakat atas nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, tenggang rasa, dan bertanggungjawab.

Pengembangan Sistem data dan Informasi

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kesempatan yang sangat terbuka atas

d. pengembangan sistem data dan informasi baik dari segi sistem dan manajemen dimana dipandang perlu sinergitas dari berbagai layanan yang terpusat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan serta lembaga lainnya yang melaksanakan layanan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat DKI Jakarta sehingga secara keseluruhan dapat menjadi satu kesatuan sistem data dan informasi yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

*Bab III
Permasalahan dan
Isu-Isu Strategis
Dinas Sosial*

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai pelaksana kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial khususnya untuk jangka waktu tahun 2017-2022 telah dianalisa menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths/ Kekuatan, Weaknesses/ Kelemahan, Opportunities/ Kesempatan, Threats/ Ancaman), telaah visi dan misi Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian, Telaah Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup serta telaah atas tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan dimuat kedalam tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi Penyusunan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Urusan Sosial	a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum semuanya diatur dalam produk hukum daerah b. Pelaksanaan urusan sosial tidak dilakukan oleh 1(satu) pelaksana	1. keterbatasan kewenangan dan belum semua sub urusan sosial yang telah ditetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh Kementerian Sosial 2. terjadi pelimpahan kewenangan
2	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Informasi	Belum terwujudnya Data dan Informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah menjadi 1 (satu) data, 1 (satu) peta kebutuhan dan 1 (satu) kebijakan	1. pelaksanaan Pemutkhiran mandiri Data penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang belum optimal; 2. terbatasnya prasarana dan sarana serta penggunaan sistem teknologi informasi

3	Terbatasnya pelaksanaan Penjangkauan Sosial	Belum terpadu dan berkelanjutan Proses mempertemukan kepentingan pelayanan antara sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial/PMKS dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial	1. karakter dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. terbatasnya kewenangan pelaksanaan penjangkauan yang bersifat koersif (memaksa)
4	Dibutuhkan peningkatan pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pencegahan dan penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak	Harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang masih belum terpadu dan berkelanjutan
5	Dibutuhkan peningkatan pelaksanaan peRehabilitasi Sosial	Sinkronisasi Pelaksanaan rehabilitasi sosial didalam dan diluar panti	Mobilitas PMKS yang tinggi dan daya tarik Kota Jakarta
6	Dibutuhkan peningkatan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	Peran serta masyarakat yang masih terbatas dan belum optimal	Terbatasnya kesadaran dan kesempatan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
7	Dibutuhkan peningkatan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Sinergi program dan strategi penanggulangan kemiskinan	Kesadaran dan peran masyarakat untuk pengentasan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

a. Visi Kepala Daerah

"Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua"

b. Misi Kepala Daerah

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial; dan
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan



Gambar 3.1

Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah

- c. Telahaan Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan urusan sosial
 1. Pendidikan bagi Warga Binaan Sosial, terdapat program kerja Gubernur melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar Plus untuk mencapai APM SD/MI dari 96, 15% menjadi 98,1%, APM SMP/MTs dari 84,79% menjadi 94,5%, APM SMA/ SMK/ MA dari 71,87% menjadi 85,75%. Peran Dinas Sosial untuk mencapai ini melakukan upaya dan sinergi dengan Dinas Pendidikan sehingga seluruh Warga Binaan Sosial usia sekolah yang berada di Panti Sosial Dinas Sosial dapat seluruhnya mendapatkan pendidikan dan dukungan pembiayaan dari Bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
 2. Pengentasan Kemiskinan dengan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 (satu) persen dari 3,78% pada tahun 2017 menjadi 2,78% pada tahun 2022 melalui:
 - a. Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, Dinas Sosial berperan melalui pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar kepada warga masyarakat yang memenuhi kriteria agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan, Dinas Sosial berperan melakukan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama (UEP dan KUBE).

3. Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial dan ORang Terlantar, dengan 100% cakupan Jaminan Kesehatan semesta (Universal Health Coverage) di tahun 2022 dan mengembangkan layanan OK-Care, dokter komunitas, dimana Dinas Sosial berperan memberikan aksesibilitas dan fasilitasi bagi Warga Binaan Sosial di Panti Sosial dan Orang terlantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas melalui:
 - a. Revitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis aplikasi serta memberikan layanan hukum, psikologis dan layanan rumah aman bagi korban. Dinas Sosial berperan membentuk Rumah Aman dan mengoptimalkan peran Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.
 - b. Mewujudkan aksesibilitas kaum difabel terhadap pelayanan dasar, pelayanan publik dan kesempatan kerja/ berusaha melalui pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan alat bantu fisik.
 - c. Penguatan ketahanan keluarga, melalui pemberian Program Keluarga Harapan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
5. Peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, melalui One Kecamatan One Center of entrepreneurship (OK-OCE) di 44 Kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha warga dan mewujudkan 200.000 pewirausaha dan 200.000 lapangan kerja dengan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (UEP/ KUBE) bagi fakir miskin dan rentan miskin sehingga fakir miskin dan rentan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan meningkatkan usahanya menjadi wirau-saha yang lebih maju dan sukses;
6. Peningkatan integrasi aparatur dan akuntabilitas pemerintahan, melalui integrasi data dalam rangka mewujudkan One data, One Map, One Policy (Jakarta Satu) salah satunya dengan melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) program penanggulangan Kemiskinan yang lebih terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Tabel 3.2.

Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan Pelayanan Dinas Sosial dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur

No	Misi/Program Gubernur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan	a. kebijakan pelimpahan kewenangan b. optimalisasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan struktur organisasi dan kelembagaan	a. penyusunan produk hukum daerah dan standar operasional prosedur yang harmonis dan terpadu b. pola koordinasi yang menguraikan pelaksanaan tugas dan fungsi
2	Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang	c. perencanaan dan pelaksanaan urusan sosial belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan; d. pelaksanaan urusan sosial masih bersifat parsial (perbidang) berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi SKPD terkait;	a. kesamaan keinginan untuk pengelolaan dan pendayagunaan data dan informasi yang terpadu; b. penggunaan teknologi informasi
3	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas	a. keterbatasan sumber daya manusia, prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; perkembangan permasalahan urusan sosial yang sangat dinamis	a. dukungan perencanaan dan anggaran yang efektif dan efisien; peningkatan dukungan peran serta masyarakat dan unit kerja terkait serta pemerintah pusat

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Strategis dan arah kebijakan Kementerian Sosial pada rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019:

1. Sasaran Strategis, meliputi:
 - a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan
 - b. Sistem penyeenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional
2. Arah Kebijakan, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
 - c. Pengembangan penghidupan berkelanjutan;
 - d. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;
 - e. Penguatan kelembagaan dan sdm penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Program Utama, meliputi:
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Program Penanganan Fakir Miskin;
 - c. Program rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Dukungan, meliputi:
 - a. Program badan pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial;
 - b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan
 - c. Program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian sosial.

3.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable development Goals (TPB/SDGs)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/ SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dinas Sosial bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/ SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.



Pada aspek implementasi, Dinas Sosial memiliki keterkaitan erat terhadap 8 (delapan) tujuan dari 17 tujuan yang terdapat pada TPB/ SDGs. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial tersebut yakni :

1. Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tanpa Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. Pendidikan Berkualitas - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Kesetaraan Gender - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
7. Berkurangnya Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
8. Penanganan perubahan iklim, perubahan iklim sering kali mengakibatkan terjadinya korban bencana;
9. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
10. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisa dan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan rencana strategis sebagaimana tersebut diatas karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka penentuan isu-isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 3.5
Isu Strategis yang mempengaruhi penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Sosial*

Berdasarkan hasil dari berbagai telaah sebagaimana diuraikan, maka Dinas Sosial menentukan Isu strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

1. mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) serta Rencana Strategis Kementerian Sosial;
2. mendukung dan melaksanakan upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya standar pelayanan minimal bidang sosial;
3. mendukung pelaksanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dilaksanakan melalui dukungan fasilitasi atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan sosial di Kabupaten Administrasi;
4. melaksanakan optimalisasi atas Pendayaagunaan Potensi Daerah dalam pelaksanaan urusan sosial; dan
5. mendorong pencapaian penanganan dan pelaksanaan urusan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Kami Peduli ... Go !!!

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada hasil telaah dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan sosial.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial maka Dinas Sosial pada tahun 2017-2022 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (Komposit Dinas Sosial)	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
		Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah (Komposit Dinas Sosial)	2,07	2,32	2,46	2,48	2,50
2	Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Uraian tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.1 meliputi:

1. Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif

Dalam mewujudkan kota Jakarta yang aman, tertib dan inklusif maka Dinas Sosial menentukan sasaran dengan terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial.

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban tersebut sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 khususnya pada substansi muatan materi yang mengatur tentang pelaksanaan tertib sosial sehingga peran Dinas Sosial dipandang cukup strategis dalam mewujudkan kota Jakarta yang Aman, tertib dan inklusif.

Penanganan Konflik Sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial dan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial maka Dinas sosial menyusun perencanaan jangka menengah dengan mempertimbangkan indeks potensi kerawanan sosial sesuai lingkup tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Perwujudan kota Jakarta yang aman, tertib dan inklusif juga dapat diartikan sebagai perwujudan dari Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang siap dan tangguh dalam penanganan bencana dan Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana dan korban bencana.

2. Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya melalui program dan strategi diantaranya meliputi:

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
- e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. program transmigrasi; dan
- e. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial melalui beberapa upaya:

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan penetapan warga miskin/fakir miskin melalui proses pemutakhiran mandiri;
- b. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga melalui pemberian bantuan sosial dalam upaya mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial secara terpadu dan berkelanjutan melalui upaya untuk mewujudkan kapasitas kelembagaan, baik itu kelembagaan Dinas, Suku Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis diantaranya melalui:

- a. Penyediaan dukungan prasarana dan sarana;
- b. Melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. Melakukan pengembangan sistem;
- d. Memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya; dan
- e. Pelaksanaan indeks/ survei kepuasan masyarakat.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kedalam kehidupan yang layak dan normatif

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya sebagai pedoman dalam menentukan jenis dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah mengatur dan menetapkan jenis dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam menindaklanjuti amanat pola penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022 Dinas Sosial menetapkan tujuan dan sasaran dalam mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. Sasaran:

Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Strategi:

1. Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dimana peran aktif masyarakat tersebut merupakan bagian dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat baik dilakukan sebagai pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat maupun sebagai relawan sosial.

untuk mendukung optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas manajemen;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian bantuan stimulan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan

3. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi meningkatkan cakupan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dengan menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana.

4. Berperan dalam Pengentasan Kemiskinan

Strategi Dinas Sosial untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui mensinergikan upaya penanganan fakir miskin, diantaranya melalui:

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan penetapan warga miskin/ fakir miskin melalui proses pemutakhiran mandiri, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

2. Pengoordinasian pelaksanaan pemuktahiran mandiri data terpadu fakir miskin dalam program penanggulangan kemiskinan;
 3. Penetapan Basis Data Terpadu menjadi data utama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan salah satu strateginya adalah menetapkan pada Basis Data terpadu program penanggulangan kemiskinan tersebut sekaligus merupakan data fakir miskin calon penerima bantuan.
- b. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dengan strategi pemberian bantuan sosial dalam upaya mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, diantaranya melalui arah kebijakan pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dan mensinergikan dengan pemberian Bantuan Sosial lainnya dalam bentuk uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
5. Mewujudkan Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan strategi mengupayakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - a. Penyediaan dukungan prasarana dan sarana meliputi peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai;
 - b. peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai;
 - c. Melakukan supervisi dan evaluasi;
 - d. Melakukan pengembangan sistem;
 - e. Memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya; dan
 - f. Pelaksanaan indeks/ survei kepuasan masyarakat.

Tabel V
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua			
MISI I : Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memantapkan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Mengentaskan PMKS ke dalam kehidupan yang layak dan normatif	1.1 Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak dasar PMKS	1.1.1 Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1.1.1 Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam sistem pelaporan titik rawan PMKS
		1.1.2 Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial	1.1.2.1 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial berdasarkan standar dan kebutuhan
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial	2.1 Meningkatnya peran aktif individu, kelompok, masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1.1. Optimalisasi PSKS	2.1.1.1 Pelaksanaan pelayanan sosial partisipatif dengan masyarakat dan lembaga sosial
3. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana sesuai dengan kebutuhan dasar	3.1 Meningkatkan cakupan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	3.1.1 Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana	3.1.1.1 Penumbuhan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM penanganan bencana seperti Kampung Siaga Bencana

MISI II :Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengolaan tata ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Berperan dalam pengentasan kemiskinan	1.1 Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan berbasis Keluarga	1.1.1 Mensinergikan upaya penanganan fakir miskin	1.1.1.1 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Informasi Jaminan Sosial
MISI III :Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya , mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.1 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.1.1 Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	1.1.1.1 Pelayanan administrasi kantor yang berkualitas dan akuntabel
		1.1.2 Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	1.1.2.1 Pengelolaan kendaraan operasional yang berkualitas dan akuntabel

Kami Peduli ... Go !!!

*Bab VI
Rencana Program
dan Kegiatan
Serta Pendanaan*

Tabel V

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.Mengentaskan PMKS ke dalam kehidupan yang layak dan normatif				Indeks Potensi Kerawanan Sosial (Komposit Dinas Sosial)		24,97		24,95	
	1.Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak dasar PMKS		1.Program Rehabilitasi Sosial	1.Persentase PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	4,8%	14,9%	278.091.309.246	38,7%	535.031.654.231
			Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	Jumlah penerima bantuan KLJ	0	14.520 Orang	104.544.000.000	40.419 Orang	291.016.800.000
			PKD Anak	Jumlah penerima bantuan PKD Anak	0	0	0	7.003 Orang	25.210.800.000
			PKD Penyandang Disabilitas	Jumlah penerima bantuan PKD Penyandang Disabilitas	0	0	0	7.137 Orang	25.693.200.000
			Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)	Jumlah surat rekomendasi pengangkatan anak	30 Dokumen	30 Dokumen	96.690.000	30 Dokumen	106.090.000
			Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak Panti Melalui Pengembangan Konsep Diri	Jumlah dokumen kajian	0	1 Dokumen	83.410.000	Implementasi	0
			Pelaksanaan Temu Konsultasi Komisi Daerah Lanjut Usia Se-Jawa dan Bali	Jumlah Dokumen kesepakatan	0	1 Dokumen	86.125.000	0	0
			Pemberian Bantuan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi eks Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial	Jumlah eks WBS panti sosial yang menerima bantuan UEP	0	120 Orang	374.083.480	140 Orang	475.850.000
			Apresiasi Kreativitas Pentas Seni Anak Dalam Rangka Mengekspresikan Potensi dan Bakat Anak	Jumlah peserta kegiatan	1000 Orang	800 Orang	335.259.000	1000 Orang	341.202.255
			Apresiasi Kreativitas Disabilitas	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	500 Orang	266.635.891
			Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik	Jumlah penerima alat bantu penunjang fisik	705 Orang	476 Orang	723.671.773	585 Orang	1.023.543.486
			Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi Warga Binaan Sosial (WBS) pada Panti Sosial	Jumlah WBS yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi	7000 WBS	7000 WBS	9.758.391.919	7000 WBS	10.183.481.903
			Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Perlengkapan Kebersihan	7000 WBS	7000 WBS	7.274.376.226	7000 WBS	7.883.480.356
			Penyediaan Tenaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Panti Sosial	Jumlah Tenaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terampil	585 Orang	585 Orang	37.386.948.821	585 Orang	42.409.714.380
			Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS) pada Panti Sosial	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	7000 WBS	7000 WBS	108.429.429.272	7000 WBS	113.270.821.097
			Penyediaan Kebutuhan Sandang bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Kebutuhan Sandang	7000 WBS	7000 WBS	8.067.357.771	7000 WBS	10.343.240.801
			Pemeliharaan Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial	Jumlah WBS yang diberikan pemeliharaan Kesehatan	7000 WBS	7000 WBS	931.565.984	7000 WBS	1.051.667.322
			Penyediaan Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan di rumah aman	0	25 Orang	0	150 Orang	4.391.220.334

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
22,19		22,00		22,47		22,47			
64,5%	836.745.320.549	75,0%	962.739.216.563	85,4%	1.090.447.128.884	85,4%	3.703.054.629.472	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
77.524 Orang	558.172.800.000	92.533 Orang	666.237.600.000	107.573 Orang	774.525.600.000	107.573 Orang	2.394.496.800.000	Dinas dan Sudin	BPKD
9.531 Orang	34.311.600.000	10.280 Orang	37.008.000.000	10.933 Orang	39.358.800.000	10.933 Orang	135.889.200.000	Dinas dan Sudin	BPKD
11.422 Orang	41.119.200.000	12.938 Orang	46.576.800.000	14.459 Orang	52.052.400.000	14.459 Orang	165.441.600.000	Dinas dan Sudin	BPKD
30 Dokumen	106.090.000	30 Dokumen	106.090.000	30 Dokumen	106.090.000	150 Dokumen	521.050.000	Dinas Sosial	Provinsi
Implementasi	0	Implementasi	0	Implementasi	0	1 Dokumen	83.410.000	Dinas Sosial	Provinsi
0	0	0	0	0	0	0	86.125.000	Dinas Sosial	Provinsi
160 Orang	582.075.000	160 Orang	582.075.000	160 Orang	582.075.000	740 Orang	2.596.158.480	Dinas Sosial	Provinsi
1200 Orang	375.322.481	1400 Orang	412.854.729	1600 Orang	454.140.201	6000 Orang	1.918.778.665	Dinas Sosial	Provinsi
600 Orang	280.000.000	700 Orang	290.000.000	800 Orang	300.000.000	2600 Orang	1.136.635.891	Dinas Sosial	Provinsi
590 Orang	1.132.564.576	590 Orang	1.196.198.880	590 Orang	1.267.391.539	2831 Orang	5.343.370.254	Sudinsos	Kota
7000 WBS	11.256.283.348	7000 WBS	12.108.248.511	7000 WBS	13.085.282.550	35000 WBS	56.391.688.231	UPT Pant	Wilayah
7000 WBS	8.536.238.774	7000 WBS	9.470.417.576	7000 WBS	10.182.659.597	35000 WBS	43.347.172.529	UPT Pant	Wilayah
585 Orang	46.695.762.145	585 Orang	51.066.592.313	585 Orang	56.522.368.626	585 Orang	234.081.386.285	UPT Pant	Wilayah
7000 WBS	116.118.568.600	7000 WBS	118.572.198.025	7000 WBS	121.858.564.211	35000 WBS	578.249.581.205	UPT Pant	Wilayah
7000 WBS	11.153.768.044	7000 WBS	12.097.502.183	7000 WBS	13.014.196.456	35000 WBS	54.676.065.255	UPT Pant	Wilayah
7000 WBS	1.149.920.841	7000 WBS	1.259.512.606	7000 WBS	1.382.433.964	35000 WBS	5.775.100.717	UPT Pant	Wilayah
150 Orang	4.391.220.334	150 Orang	4.391.220.334	150 Orang	4.391.220.334	625 Orang	17.564.881.336	PSP BK	Wilayah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan wawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penanganan Orang dengan HIV (ODH)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melayani ODH yang mengikuti kegiatan pencerahan wawasan	0	0	0	14 Lembaga	14.248.000
			Pengembangan wawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Institusi Penerima Wajib Lapor Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melayani korban NAPZA yang mengikuti kegiatan	0	0	0	14 Lembaga	14.248.000
			Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pendamping penerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	0	311 Orang	1.335.410.406
			1 ^{****}	2. Persentase lokasi strategis di wilayah provinsi DKI Jakarta yang bersih dari PMKS Jalanan	87%	89%	23.195.292.338	92%	24.988.807.008
			Pengendalian dan Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan	Jumlah titik rawan PMKS yang bersih dari PMKS Jalanan	276 Titik	284 Titik	22.414.244.938	292 Titik	23.861.770.558
			Pembekalan Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial PMKS Jalanan	Jumlah petugas Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial PMKS Jalanan yang terlatih	425 Orang	425 Orang	90.712.000	425 Orang	400.000.000
			Pelaksanaan temu Konsultasi, monitoring dan evaluasi pemulangan PMKS ke daerah asal	Jumlah dokumen kesepakatan hasil konsultasi	0	1 Dokumen	250.500.000	0	0
			Pemulangan PMKS Jalanan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS Hasil Binaan yang dipulangkan ke daerah asal	500 Orang	600 Orang	439.835.400	800 Orang	727.036.450
			2.Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial	1. Presentase sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	40%	51%	40.038.793.889	64%	68.011.817.044
			Rehab Total Gedung Panti Sosial	Jumlah Gedung Panti yang di Rehab Total	1 Gedung	0	0	1 Gedung	14.919.559.051
			Rehab Berat Gedung Panti Sosial	Jumlah Gedung Panti yang di Rehab Berat	2 Gedung	5 Gedung	14.949.376.940	5 Gedung	13.481.341.900
			Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Skor Kepuasan Masyarakat	0	70 Skor	124.190.000	75 Skor	150.000.000
			Pengembangan Teknologi Sistem Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Aplikasi Kesejahteraan Sosial yang terbangun dan terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	354.227.600	1 Aplikasi	500.000.000
			Pemeliharaan Gedung SKKT	Jumlah Gedung SKKT yang terpelihara	0	94 Gedung	470.358.471	124 Gedung	1.249.917.118
			Perawatan Gedung SKKT	Jumlah Gedung SKKT yang terawat	7 Gedung	14 Gedung	13.910.857.024	27 Gedung	23.677.117.922
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai	1 paket	1 paket	4.742.623.358	1 paket	5.216.885.693
			Perawatan Gedung Panti Sosial	Jumlah Gedung Panti Sosial yang terawat	45 Gedung	46 Gedung	1.623.840.391	46 Gedung	1.786.224.430
			Pemeliharaan Gedung Panti Sosial	Jumlah Gedung Panti Sosial yang terpelihara	45 Gedung	46 Gedung	728.560.988	46 Gedung	801.417.086

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	56.992.000	Dinas Sosial	Provinsi
14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	14.248.000	14 Lembaga	56.992.000	Dinas Sosial	Provinsi
311 Orang	1.335.410.406	311 Orang	1.335.410.406	311 Orang	1.335.410.406	311 Orang	5.341.641.624	Dinas Sosial	Provinsi
94%	26.354.708.179	97%	27.922.559.719	100%	29.012.117.123	100%	131.473.484.367	Dinas dan sudin	Provinsi dan Kota
300 Titik	25.133.124.629	309 Titik	26.428.006.269	318 Titik	27.747.583.223	318 Titik	125.584.729.617	Dinas dan sudin	Provinsi dan Kota
425 Orang	400.000.000	425 Orang	400.000.000	425 Orang	400.000.000	425 Orang	1.690.712.000	Dinas dan sudin	Provinsi dan Kota
0	0	1 Dokumen	250.500.000	0	0	2 Dokumen	501.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
800 Orang	821.583.550	800 Orang	844.053.450	800 Orang	864.533.900	3800 Orang	3.697.042.750	Dinas dan sudin	Provinsi dan Kota
77%	55.459.602.591	87%	41.171.820.164	100%	35.982.741.984	100%	240.585.935.672	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Gedung	15.932.851.582	0	0	0	0	2 Gedung	30.852.410.633	Dinas Sosial	Provinsi
3 Gedung	11.845.961.700	4 Gedung	16.387.875.596	4 Gedung	10.593.355.680	21 Gedung	67.257.911.816	Dinas Sosial	Provinsi
80 Skor	150.000.000	85 Skor	150.000.000	90 Skor	150.000.000	90 Skor	724.190.000	Dinas Sosial	Provinsi
2 Aplikasi	500.000.000	2 Aplikasi	500.000.000	2 Aplikasi	500.000.000	2 Aplikasi	2.354.227.600	Dinas Sosial	Provinsi
124 Gedung	1.325.201.658	124 Gedung	1.391.993.218	124 Gedung	1.500.318.212	124 Gedung	5.937.788.677	Sudinsos	Kota
14 Gedung	7.741.906.700	13 Gedung	6.900.000.000	12 Gedung	6.850.000.000	80 Gedung	59.079.881.646	Sudinsos	Kota
1 paket	5.738.574.263	1 paket	6.312.431.689	1 paket	6.943.674.858	5 Paket	28.954.189.861	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
46 Gedung	1.964.846.873	46 Gedung	2.161.331.560	46 Gedung	2.377.464.716	46 Gedung	9.913.707.970	UPT	Wilayah
46 Gedung	881.558.795	46 Gedung	969.714.675	46 Gedung	1.066.686.142	46 Gedung	4.447.937.686	UPT	Wilayah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembuatan Detail Engeenering Desain (DED) Rehabilitasi Gedung Panti Sosial	Jumlah Detail Engineering Design (DED) Rehab Gedung Panti Sosial	0	0	0	4 Dokumen	400.000.000
			Peningkatan Peribadatan Tausiah Masjid PPPIJ	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peribadatan Tausiah Masjid PPPIJ	4 Kegiatan	4 Kegiatan	62.960.000	10 Kegiatan	113.610.000
			Peningkatan Nilai Nilai Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nilai Nilai Keagamaan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	40.990.000	5 Kegiatan	36.290.000
			Amaliyah Ramadhan	Jumlah peserta Amaliyah Ramadhan	100 Orang	100 Orang	266.900.000	200 orang	416.200.000
			Pelatihan Hisab dan Rukyat serta Pemantauan Hilal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	42.565.000	3 Kegiatan	39.756.684
			Pelatihan Penjualan hewan qurban Sesuai syariah dan kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan	100 Orang	100 Orang	26.360.900	0	0
			Pelaksanaan penyiaran radio PPPIJ	Frekuensi penyiaran radio PPPIJ yang aktif	1 Frekuensi	1 Frekuensi	162.960.700	1 Frekuensi	90.000.000
			Peningkatan Layanan Perpustakaan PPPIJ	Jumlah pengunjung perpustakaan PPPIJ	100 orang	200 orang	73.550.000	300 orang	83.964.021
			Diskusi Pemikiran Islam,Isu Aktual dan Seni Budaya	Jumlah kegiatan diskusi yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	24.750.000	6 Kegiatan	30.264.000
			Riset-riset keagamaan di Jakarta	Jumlah laporan riset keagamaan	1 laporan	1 laporan	34.305.000	1 laporan	34.305.000
			Kongres Islamic Centre Indonesia	Jumlah peserta konggres	0	150 Orang	67.236.250	0	0
			Seminar Lokakarya Media Islam Indonesia	Jumlah peserta seminar	0	0	0	100 Orang	13.937.900
			Perencanaan desain galeri Islam Jakarta PPPIJ	Dokumen desain galeri islam PPPIJ	0	1 Dokumen	42.000.000	0	
			Pengadaan Prasarana dan Sarana PPPIJ	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	44.463.269	1 Paket	371.643.397
			Pelatihan Penyiaran PPPIJ	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	0	45 Orang	44.620.000	45 Orang	44.620.000
			Pendidikan dan Pelatihan Falakiah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan falakiah	0	0	0	20 Orang	29.605.000
			Pendidikan Kader Peradaban	Jumlah peserta pendidikan kader peradaban	0	0	0	20 Orang	31.175.000
			Penerjemahan dan penerbitan buku hasil- hasil kajian PPPIJ	Jumlah eksemplar buku hasil penerjemahan	0	0	0	600 Eksemplar	35.427.400
			Festival Muharram 1440 Hijriyah	Jumlah hari pelaksanaan festival	0	0	0	3 hari	40.248.708
			Workshop Pembekalan Petugas Pengumpul Zakat PPPIJ	Jumlah peserta workshop	0	0	0	100 orang	7.345.000
			TOT Pemberdayaan Pemuda Islam Jakarta	Jumlah peserta TOT	0	0	0	60 Orang	21.520.000
			Pemberdayaan Keterampilan Masyarakat	Jumlah peserta Pemberdayaan Keterampilan Masyarakat	0	0	0	50 Orang	19.710.000
			Pengembangan Layanan Informasi dan Website	Jumlah website yang tersedia dan update	0	0	0	1 Website	20.000.000
			Pembangunan Fisik Design Interior Galeri Islam Jakarta	Lokasi pembangunan fisik design interior galeri islam jakarta	0	0	0	0	0
			Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kawasan PPPIJ	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kawasan PPPIJ	1 Paket	1 Paket	1.022.917.998	1 Paket	1.488.047.248

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
								(19)	(20)
4 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	500.000.000	0	0	13 Dokumen	1.300.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
10 Kegiatan	113.610.000	10 Kegiatan	113.610.000	10 Kegiatan	113.610.000	44 Kegiatan	517.400.000	PPPIJ	Wilayah
5 Kegiatan	40.990.000	5 Kegiatan	40.990.000	5 Kegiatan	40.990.000	25 Kegiatan	200.250.000	PPPIJ	Wilayah
200 orang	416.200.000	200 orang	416.200.000	200 orang	416.200.000	900 orang	1.931.700.000	PPPIJ	Wilayah
3 Kegiatan	42.565.000	3 Kegiatan	42.565.000	3 Kegiatan	42.565.000	15 Kegiatan	210.016.684	PPPIJ	Wilayah
100 Orang	26.360.900	0	0	100 Orang	26.360.900	300 Orang	79.082.700	PPPIJ	Wilayah
1 Frekuensi	90.000.000	1 Frekuensi	90.000.000	1 Frekuensi	90.000.000	1 Frekuensi	522.960.700	PPPIJ	Wilayah
400 orang	83.964.021	400 orang	88.995.577	400 orang	88.995.577	1700 orang	419.469.196	PPPIJ	Wilayah
6 Kegiatan	30.264.000	6 Kegiatan	30.264.000	6 Kegiatan	30.264.000	29 kegiatan	145.806.000	PPPIJ	Wilayah
1 laporan	34.305.000	1 laporan	34.305.000	1 laporan	34.305.000	5 Laporan	171.525.000	PPPIJ	Wilayah
150 Orang	67.236.250	0	0	150 Orang	67.236.250	450 Orang	201.708.750	PPPIJ	Wilayah
100 Orang	13.937.900	100 Orang	13.937.900	100 Orang	13.937.900	400 Orang	55.751.600	PPPIJ	Wilayah
0		0		0		1 Dokumen	42.000.000	PPPIJ	Wilayah
1 Paket	371.643.397	1 Paket	371.643.397	1 Paket	371.643.397	5 paket	1.531.036.857	PPPIJ	Wilayah
45 Orang	44.620.000	45 Orang	44.620.000	45 Orang	44.620.000	225 Orang	223.100.000	PPPIJ	Wilayah
20 Orang	29.605.000	20 Orang	29.605.000	20 Orang	29.605.000	80 Orang	118.420.000	PPPIJ	Wilayah
20 Orang	31.175.000	20 Orang	31.175.000	20 Orang	31.175.000	80 Orang	124.700.000	PPPIJ	Wilayah
600 Eksemplar	35.427.400	600 Eksemplar	35.427.400	600 Eksemplar	35.427.400	2400 Eksemplar	141.709.600	PPPIJ	Wilayah
3 hari	40.248.708	3 hari	40.248.708	3 hari	40.248.708	12 hari	160.994.832	PPPIJ	Wilayah
100 orang	7.345.000	100 orang	7.345.000	100 orang	7.345.000	400 Orang	29.380.000	PPPIJ	Wilayah
60 Orang	21.520.000	60 Orang	21.520.000	60 Orang	21.520.000	240 Orang	86.080.000	PPPIJ	Wilayah
50 Orang	19.710.000	50 Orang	19.710.000	50 Orang	19.710.000	200 Orang		PPPIJ	Wilayah
1 Website	20.000.000	1 Website	20.000.000	1 Website	20.000.000	1 Website	80.000.000	PPPIJ	Wilayah
1 Lokasi	3.000.000.000	0	0	0	0	1 Lokasi	3.000.000.000	PPPIJ	Wilayah
1 Paket	1.488.047.248	1 Paket	1.488.047.248	1 Paket	1.488.047.248	5 paket	6.975.106.990	PPPIJ	Wilayah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam	Jumlah pelaksanaan kegiatan	0	4 Kegiatan	188.400.000	4 Kegiatan	270.381.000
			Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan Islam	Jumlah pelaksanaan kegiatan	0	64 kegiatan	443.300.000	64 kegiatan	464.440.000
			Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	Jumlah pelaksanaan kegiatan	0	2 Kegiatan	264.980.000	2 Kegiatan	267.033.084
			Penyelenggaraan Pesantren Kilat	Jumlah peserta kegiatan	0	45 Orang	169.500.000	45 Orang	170.013.271
			Peningkatan Kajian Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	Jumlah kajian kelembagaan pendidikan masyarakat	0	4 Dokumen	112.000.000	4 Dokumen	151.513.271
			Pelatihan tahsin Al Qur'an	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	25 Orang	402.093.271
			Pelatihan Tahfidz Quran	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	25 Orang	402.093.271
			Pengajian Dhuha	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengajian dhuha	0	0	0	46 Kegiatan	101.200.000
			Pelatihan Kader Mubaligh	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	150 Orang	265.113.271
			Seminar wawasan keagamaan Islam	Jumlah peserta seminar	0	0	0	50 Orang	21.776.542
			Pelatihan pengurus Majelis Ta'lim	Jumlah peserta pelatihan	0	0	0	30 Orang	52.713.271
			Pelatihan manajemen Masjid	Jumlah peserta pelatihan	0	0	0	30 Orang	52.713.271
			Launching Pundi Amal Nusantara	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	250 Orang	35.138.290
			Ramadhan Expo Tahunan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	0	0	0	1 Kegiatan	118.897.250
			Pelatihan penyembelihan hewan qurban sesuai syariah dan kesehatan	Jumlah peserta kegiatan pelatihan	0	0	0	50 Orang	7.213.271
			Festival Santri dan Pelajaran Nusantara	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	500 Orang	44.588.290
			Gebyar Seni Qasidah	Jumlah peserta kegiatan	0	0	0	500 Orang	34.763.862
			Peningkatan layanan perpustakaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	Jumlah pengunjung perpustakaan	0	0	0	0	0
			Perawatan dan Pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	0	0	0	0	0
2.Mewujudkan lingkungan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial									
	1.Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial		1.Program pemberdayaan sosial	1. Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.714 Orang	2.744 Orang	2.385.296.000	3.194 Orang	3.338.835.050
			Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang dibina	30 Orang	36 Orang	123.016.000	36 Orang	129.166.800
			Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial berprestasi tingkat kota yang dibina	30 Orang	36 Orang	219.950.000	36 Orang	262.685.750

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
4 Kegiatan	270.381.000	4 Kegiatan	270.381.000	4 Kegiatan	270.381.000	20 Kegiatan	1.269.924.000	PMR	Wilayah
64 kegiatan	464.440.000	64 kegiatan	464.440.000	64 kegiatan	464.440.000	320 Kegiatan	2.301.060.000	PMR	Wilayah
2 Kegiatan	267.033.084	2 Kegiatan	267.033.084	2 Kegiatan	267.033.084	10 Kegiatan	1.333.112.336	PMR	Wilayah
45 Orang	170.013.271	45 Orang	170.013.271	45 Orang	170.013.271	225 Orang	849.553.084	PMR	Wilayah
4 Dokumen	151.513.271	4 Dokumen	151.513.271	4 Dokumen	151.513.271	20 Dokumen	718.053.084	PMR	Wilayah
25 Orang	402.093.271	25 Orang	402.093.271	25 Orang	402.093.271	100 Orang	1.608.373.084	PMR	Wilayah
25 Orang	402.093.271	25 Orang	402.093.271	25 Orang	402.093.271	100 Orang	1.608.373.084	PMR	Wilayah
46 Kegiatan	101.200.000	46 Kegiatan	101.200.000	46 Kegiatan	101.200.000	184 Kegiatan	404.800.000	PMR	Wilayah
150 Orang	265.113.271	150 Orang	265.113.271	150 Orang	265.113.271	600 Orang	1.060.453.084	PMR	Wilayah
50 Orang	21.776.542	50 Orang	21.776.542	50 Orang	21.776.542	200 Orang	87.106.168	PMR	Wilayah
30 Orang	52.713.271	30 Orang	52.713.271	30 Orang	52.713.271	120 Orang	210.853.084	PMR	Wilayah
30 Orang	52.713.271	30 Orang	52.713.271	30 Orang	52.713.271	120 Orang	210.853.084	PMR	Wilayah
0	0	0	0	0	0	250 Orang	35.138.290	PMR	Wilayah
1 Kegiatan	118.897.250	1 Kegiatan	118.897.250	1 Kegiatan	118.897.250	4 Kegiatan	475.589.000	PMR	Wilayah
50 Orang	7.213.271	50 Orang	7.213.271	50 Orang	7.213.271	200 Orang	28.853.084	PMR	Wilayah
500 Orang	44.588.290	500 Orang	44.588.290	500 Orang	44.588.290	2000 Orang	178.353.160	PMR	Wilayah
500 Orang	34.763.862	500 Orang	34.763.862	500 Orang	34.763.862	2000 Orang	139.055.448	PMR	Wilayah
200 Orang	83.380.000	300 Orang	91.718.000	400 Orang	100.889.800	900 Orang	275.987.800	PMR	Wilayah
1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	3 Paket	3.000.000.000	PMR	Wilayah
3.644 Orang	3.409.414.502	4.094 Orang	3.485.457.704	4.545 Orang	3.566.509.743	4.545 Orang	16.185.512.999	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
36 Orang	135.625.140	36 Orang	142.406.397	36 Orang	149.526.716	180 Orang	679.741.053	Dinas Sosial	Provinsi
36 Orang	277.411.550	36 Orang	293.418.300	36 Orang	309.875.945	180 Orang	1.363.341.545	Sudin Sosial	Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Bimbingan dan Latihan Tingkat Lanjutan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	0	0	200 Orang	159.468.350
			Bimbingan dan Latihan Tingkat Dasar bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki keterampilan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	0	0	400 Orang	231.752.840
			Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Sejak Dini	Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Sejak Dini	0	1 Laporan	23.660.000	1 Laporan	35.000.000
			Pemberian Penghargaan Kepada Janda Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Penghargaan Kepada Janda Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang menerima pemberian penghargaan	157 Orang	157 Orang	1.886.170.000	150 Orang	1.854.948.810
			Penelitian dan Pengkajian Gelar Pahlawan dan Gelar Kehormatan	Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian gelar pahlawan dan gelar kehormatan yang dilakukan	2 Dokumen	2 Dokumen	132.500.000	2 Dokumen	135.812.500
			Olimpiade tentang Pahlawan Indonesia	Jumlah sekolah yang mengikuti olimpiade tentang Pahlawan Indonesia tingkat Provinsi	0	0	0	50 Sekolah	100.000.000
			Kemah Kebangsaan bagi Remaja dilokasi Rawan Konflik	Jumlah peserta kemah kebangsaan	0	0	0	100 Orang	150.000.000
			Napak Tilas Sejarah Lokal	Jumlah Peserta Kegiatan Napak Tilas Sejarah Lokal	0	0	0	200 Orang	60.000.000
			Silahturahmi Gubernur dengan Warakawuri, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan	Jumlah peserta kegiatan silahturahmi	0	0	0	150 Orang	220.000.000
			1'	2. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	843 Lembaga	863 Lembaga	1.040.449.000	883 Lembaga	1.229.716.750
			Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti pembinaan dan penilaian	30 Lembaga	30 Lembaga	167.996.000	30 Lembaga	176.395.800
			Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan dan penilaian tingkat kota	50 Lembaga	50 Lembaga	368.447.000	50 Lembaga	375.079.750
			Bimbingan Pelatihan Kemandirian tingkat lanjutan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan kemandirian tingkat lanjutan	0	0	0	50 Lembaga	45.000.000
			Bimbingan Pelatihan Kemandirian tingkat dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki keterampilan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	0	0	150 Lembaga	300.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
200 Orang	159.468.350	200 Orang	159.468.350	200 Orang	159.468.350	800 Orang	637.873.400	Dinas Sosial	Provinsi
400 Orang	267.752.840	400 Orang	317.527.840	400 Orang	371.434.714	1600 Orang	1.188.468.234	Sudin Sosial	Kota
1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	5 Laporan	163.660.000	Dinas Sosial	Provinsi
150 Orang	1.854.948.810	150 Orang	1.854.948.810	150 Orang	1.854.948.810	150 Orang	9.305.965.240	Dinas Sosial	Provinsi
2 Dokumen	139.207.812	2 Dokumen	142.688.007	2 Dokumen	146.255.208	10 Dokumen	696.463.527	Dinas Sosial	Provinsi
50 Sekolah	100.000.000	50 Sekolah	100.000.000	50 Sekolah	100.000.000	200 Sekolah	400.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	400 Orang	600.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
200 Orang	60.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	60.000.000	800 Orang	240.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
150 Orang	230.000.000	150 Orang	230.000.000	150 Orang	230.000.000	150 Orang	910.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
903 Lembaga	1.270.499.080	923 Lembaga	1.325.639.202	943 Lembaga	1.381.900.887	943 Lembaga	6.248.204.919	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
30 Lembaga	185.215.590	30 Lembaga	194.476.369	30 Lembaga	204.200.188	150 Lembaga	928.283.947	Dinas Sosial	Provinsi
50 Lembaga	386.460.710	50 Lembaga	409.760.048	50 Lembaga	434.071.011	250 Lembaga	1.973.818.519	Sudin Sosial	Kota
50 Lembaga	50.000.000	50 Lembaga	50.000.000	50 Lembaga	50.000.000	200 Lembaga	195.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
150 Lembaga	300.000.000	150 Lembaga	300.000.000	150 Lembaga	300.000.000	600 Lembaga	1.200.000.000	Sudin Sosial	Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penguatan Jejaring dan Kemitraan LK3 berbasis masyarakat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan konsultasi permasalahan Kesejahteraan Sosial	400 Orang	500 Orang	504.006.000	500 Orang	130.841.200
			Penganugerahan Penghargaan Padmamitra Award	Jumlah dunia usaha yang diberikan penghargaan atas partisipasinya dalam program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR)	0	0	0	65 Dunia Usaha	150.000.000
			Seminar tentang Bina Undian	Pelaksanaan kegiatan seminar tentang bina undian	0	0	0	1 Kegiatan	26.350.000
			Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha	Pembentukan forum TSLDU	0	0	0	1 Forum	26.050.000
3.Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat				Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah (Komposit Dinas Sosial)		2,07		2,32	
	1.Meningkatkan cakupan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		1.Program Perlindungan Sosial	1.Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100%	100%	17.570.133.757	100%	25.690.495.054
			Pelayanan Siaga Bencana oleh Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Provinsi	16 Orang	16 Orang	882.792.961	24 Orang	1.230.567.413
			Pelayanan Siaga Bencana oleh Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota	Jumlah petugas piket bencana tingkat kota	60 Orang	60 Orang	3.077.396.610	66 Orang	3.241.005.951
			Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	125000 Orang/Hari	125000 Orang/Hari	5.515.618.916	125000 Orang/Hari	6.000.000.000
			Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) Bagi Korban Bencana	Jumlah tenda pengungsi yang dapat disediakan	50 Set	50 Set	1.050.500.000	50 Set	1.080.106.500
			Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	Jumlah Orang Terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	5000 Orang	6000 Orang	1.255.486.200	7000 Orang	1.519.138.302
			Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	86 Set	86 Set	676.787.870	96 Set	676.787.870
			Penyelenggaraan Dapur Umum bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan Siap Saji	250000 Orang/Hari	255577 Orang/Hari	5.111.551.200	300000 Orang/Hari	9.985.369.418
			Penyediaan Petty Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang ntuk korban bencana	0	0	0	3000 Orang	1.000.000.000
			Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB yang dibentuk	0	0	0	2 KSB	200.000.000
			Pelatihan Tagana Madya untuk Pendampingan dan Pelayanan Korban Bencana	Jumlah petugas tagana dasar yang menjadi tagana madya	200 Orang	0	0	50 Orang	225.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
500 Orang	198.822.780	500 Orang	221.402.785	500 Orang	243.629.688	2500 Orang	1.298.702.453	Sudin Sosial	Kota
80 Dunia Usaha	150.000.000	95 Dunia Usaha	150.000.000	110 Dunia Usaha	150.000.000	110 Dunia Usaha	600.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	26.350.000	Dinas Sosial	Provinsi
0	0	0	0	0	0	1 Forum	26.050.000	Dinas Sosial	Provinsi
2,46		2,48		2,50		2,50			
100%	26.038.307.614	100%	27.486.103.233	100%	27.969.810.243	100%	124.754.849.901	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
24 Orang	1.353.624.154	24 Orang	1.488.986.569	24 Orang	1.637.885.226	24 Orang	6.593.856.323	Dinas Sosial	Provinsi
66 Orang	3.412.685.916	66 Orang	3.598.516.307	66 Orang	3.787.562.119	66 Orang	17.117.166.903	Sudin Sosial	Kota
125000 Orang/Hari	6.000.000.000	125000 Orang/Hari	6.000.000.000	125000 Orang/Hari	6.000.000.000	625000 Orang/Hari	29.515.618.916	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
25 set	525.250.000	25 set	525.250.000	15 set	315.150.000	165 Set	3.496.256.500	Dinas Sosial	Provinsi
8000 Orang	1.838.031.799	8000 Orang	1.838.031.799	8000 Orang	1.838.031.799	37000 Orang	8.288.719.899	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
96 Set	350.000.000	96 Set	400.000.000	96 Set	400.000.000	96 Set	2.503.575.740	Dinas Sosial	Provinsi
300000 Orang/Hari	10.327.096.145	300000 Orang/Hari	11.140.298.958	300000 Orang/Hari	11.383.601.499	1455577 Orang/Hari	47.947.917.220	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
3000 Orang	1.000.000.000	3000 Orang	1.000.000.000	3000 Orang	1.000.000.000	12000 Orang	4.000.000.000	Sudin Sosial	Kota
2 KSB	200.000.000	3 KSB	300.000.000	3 KSB	300.000.000	10 KSB	1.000.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
50 Orang	225.000.000	50 Orang	225.000.000	50 Orang	225.000.000	200 Orang	900.000.000	Dinas Sosial	Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pelatihan Petugas Psikososial untuk Pendampingan dan Pelayanan Korban Bencana	Jumlah petugas psikososial yang terlatih	40 Orang	0	0	60 Orang	113.500.000
			Penyebarluasan Informasi Penanganan dan Pemulangan Orang Terlarang bagi Daerah Penyanggah	Jumlah Dokumen laporan kegiatan	0	0	0	1 Dokumen	37.219.600
			Perlindungan Pendapatan bagi Penerima Manfaat Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah penerima manfaat UEP/KUBE yang mendapatkan perlindungan pendapatan	0	0	0	200 KPM	346.800.000
			Pembentukan Forum Keserasian Sosial di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah forum keserasian sosial yang terbentuk di lokasi rawan konflik sosial	0	0	0	1 Forum	35.000.000
4. Berperan dalam pengentasan kemiskinan				Tingkat Kemiskinan	3,78	3,58		3,38	
	1. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan berbasis Keluarga		1. Program Penanganan Fakir Miskin	1. Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	840 KPM	890 KPM	7.533.434.732	1475 KPM	157.817.179.411
			Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) / Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Pendamping UEP/KUBE Penerima Manfaat	160 Pendamping	160 Pendamping	1.339.495.000	194 Pendamping	2.100.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah dokumen rapat	0	2 Laporan	25.300.000	2 Laporan	26.000.000
			Penguatan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Akan Exit Program	Jumlah KPM yang menerima penguatan	0	100 Orang	38.004.500	0	0
			Edukasi Perilaku Finansial Bagi Keluarga Miskin Penerima UEP/KUBE	Jumlah penerima UEP/KUBE yang diberikan edukasi perilaku finansial	0	50 Orang	21.850.000	70 Orang	37.150.000
			Pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi PMKS Potensial	Jumlah PMKS potensial yang mendapatkan bantuan pelatihan UEP	0	214 Orang	732.039.690	287 Orang	908.101.000
			Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbaharui	0	60000 KPM	1.774.709.778	120000 KPM	1.860.875.344
			Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	0	1140 KPM	2.793.506.866	1950 KPM	4.000.000.000
			Jumlah remaja yang dibina pada lokasi rawan konflik sosial	Jumlah remaja yang dibina pada lokasi rawan konflik sosial	0	300 Orang	808.528.898	320 Orang	877.725.281
			TOT Pengembangan Kualitas SDM Pendamping PKH	Jumlah pendamping PKH yang dibina	0	0	0	55 Orang	55.250.000
			Bantuan Sosial Pangan bagi KPM data terpadu PPFM Non APBN	Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan	0	0	0	112522 KPM	144.847.832.786
			Pendampingan Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Pendamping Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	0	0	0	311 Orang	2.955.160.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
80 Orang	115.000.000	80 Orang	120.000.000	80 Orang	120.000.000	80 Orang	468.500.000	Dinas Sosial	Provinsi
1 Dokumen	37.219.600	1 Dokumen	37.219.600	1 Dokumen	37.219.600	4 Dokumen	148.878.400	Dinas Sosial	Provinsi
400 KPM	584.400.000	600 KPM	742.800.000	840 KPM	855.360.000	840 KPM	2.529.360.000	Dinas Sosial	Provinsi
2 Forum	70.000.000	2 Forum	70.000.000	2 Forum	70.000.000	7 Forum	245.000.000	Dinas Sosial	Provinsi
3,18		2,98		2,78		2,78			
2060 KPM	158.252.678.277	2645 KPM	159.058.146.557	3230 KPM	159.851.075.127	3230 KPM	642.512.514.104	Dinas dan Sudin	Provinsi dan Kota
194 Pendamping	2.100.000.000	194 Pendamping	2.100.000.000	194 Pendamping	2.100.000.000	194 Pendamping	9.739.495.000	Dinas Sosial	Provinsi
2 Laporan	26.000.000	2 Laporan	26.000.000	2 Laporan	26.000.000	10 Laporan	129.300.000	Dinas Sosial	Provinsi
0	0	0	0	0	0	100 Orang	38.004.500	Dinas Sosial	Provinsi
90 Orang	50.850.000	90 Orang	50.850.000	90 Orang	50.850.000	390 Orang	211.550.000	Dinas Sosial	Provinsi
343 Orang	1.030.901.000	457 Orang	1.330.301.000	573 Orang	1.615.501.000	1874 Orang	5.616.843.690	Dinas Sosial	Provinsi
180000 KPM	1.875.053.130	240000 KPM	1.905.053.130	323514 KPM	1.956.585.440	323514 KPM	9.372.276.822	Sudin Sosial	Kota
1950 KPM	4.000.000.000	1950 KPM	4.000.000.000	1950 KPM	4.000.000.000	8940 KPM	18.793.506.866	Sudin Sosial	Kota
340 Orang	935.682.884	360 Orang	996.970.213	380 Orang	1.061.828.687	1700 Orang	4.680.735.963	Sudin Sosial	Kota
55 Orang	55.250.000	55 Orang	55.250.000	51 Orang	52.410.000	216 Orang	218.160.000	Dinas Sosial	Provinsi
112522 KPM	145.074.696.263	112522 KPM	145.489.477.214	112522 KPM	145.883.655.000	112522 KPM	581.295.661.263	Dinas Sosial	Provinsi
311 Orang	2.955.160.000	311 Orang	2.955.160.000	311 Orang	2.955.160.000	311 Orang	11.820.640.000	Dinas Sosial	Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembinaan dan Pemantapan pengelola e warong dan KUBE Jasa	Jumlah pendamping pengelola e warong dan KUBE Jasa yang dibina	0	0	0	253 Orang	45.315.000
			Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG)	Jumlah operator pelayanan yang diberikan bimtek SIKSNG	0	0	0	267 Orang	103.770.000
			Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fakir Miskin dan Bantuan Sosial	Jumlah data fakir miskin pada data BDT yang dimuktahirkan	0	0	0	323514 Keluarga	5.000.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Data	Tersedianya sistem informasi dan layanan data fakir miskin dan bantuan sosial	0	0	0	1 Sistem	3.000.000.000
5.Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				Skor EKPPD		3,1		3,15	
	1.Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		1.Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	1.Indeks kepuasan pelayanan kantor	0	3,1	70.069.065.746	3,15	74.822.660.566
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	1.573.430.799	1 Paket	1.878.676.722
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja	1 Paket	1 Paket	3.044.762.095	1 Paket	3.145.658.802
			Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedianya alat pemadam api ringan yang dapat digunakan	1 Paket	1 Paket	114.482.660	1 Paket	117.409.786
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	468.698.876	1 Paket	492.133.819
			Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	17.373.313.736	1 Paket	17.807.646.579
			Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	12 Bulan	12 Bulan	17.135.238.595	12 Bulan	19.010.428.533
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Paket	1 Paket	2.323.054.020	1 Paket	2.755.359.422
			Penyediaan sewa mesin foto copy	Tersedianya mesin foto copy sebagai penunjang kegiatan kantor	1 Paket	1 Paket	904.300.584	1 Paket	957.366.908
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Paket	1 Paket	151.264.855	1 Paket	185.461.093
			Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah sertifikasi tanah milik pemprov dki	1 Paket	1 Paket	366.365.000	0	0
			Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Tersedianya jasa dan perlengkapan keamanan kantor	1 Paket	1 Paket	11.271.747.279	1 Paket	13.178.339.202
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Gedung Dinas Sosial	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Gedung Dinas Sosial	1 Paket	1 Paket	2.493.574.741	1 Paket	2.429.051.351
			Pembinaan Pegawai Dinas Sosial	Terlaksananya kegiatan pembinaan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	36.300.000	12 Bulan	409.200.000
			Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial	Jumlah cetakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial	0	1 paket	80.850.000	0	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket	1.636.796.060	1 paket	2.979.508.616
			Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1.759.907.399	1 paket	1.975.524.228

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)		
253 Orang	45.315.000	253 Orang	45.315.000	253 Orang	45.315.000	1012 Orang	181.260.000	Dinas Sosial	Provinsi
267 Orang	103.770.000	267 Orang	103.770.000	267 Orang	103.770.000	1068 Orang	415.080.000	Dinas Sosial	Provinsi
323514 Keluarga	5.000.000.000	323514 Keluarga	5.000.000.000	323514 Keluarga	5.000.000.000	323514 Keluarga	20.000.000.000	UPT	Provinsi
1 Sistem	3.000.000.000	1 Sistem	3.000.000.000	1 Sistem	3.000.000.000	1 Sistem	12.000.000.000	UPT	Provinsi
3,2		3,25		3,3		3,3			
3,2	90.844.947.918	3,25	86.314.623.467	3,3	92.242.699.280	3,3	414.293.996.977	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	1.850.445.233	1 Paket	1.974.389.068	1 Paket	2.107.007.221	5 Paket	9.383.949.043	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	3.382.392.632	1 Paket	3.686.569.124	1 Paket	4.003.562.612	5 Paket	17.262.945.265	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	139.780.226	1 Paket	156.712.619	1 Paket	174.304.474	5 Paket	702.689.765	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	516.740.510	1 Paket	542.577.536	1 Paket	569.706.413	5 Paket	2.589.857.154	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	18.252.837.743	1 Paket	18.709.158.687	1 Paket	19.176.887.654	5 Paket	91.319.844.399	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
12 Bulan	20.557.824.782	12 Bulan	21.669.085.267	12 Bulan	22.948.476.425	12 Bulan	101.321.053.602	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	2.910.895.364	1 Paket	3.091.984.900	1 Paket	3.401.183.390	5 Paket	14.482.477.096	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	1.044.848.392	1 Paket	1.112.354.898	1 Paket	1.185.460.055	5 Paket	5.204.330.837	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	202.019.670	1 Paket	212.019.410	1 Paket	218.392.681	5 Paket	969.157.709	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
0	0	0	0	0	0	1 Paket	366.365.000	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	15.349.014.963	1 Paket	16.480.727.604	1 Paket	17.749.544.861	5 Paket	74.029.373.909	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 Paket	2.737.844.390	1 Paket	2.963.885.129	1 Paket	3.216.037.689	5 Paket	13.840.393.300	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
12 Bulan	409.200.000	12 Bulan	409.200.000	12 Bulan	409.200.000	12 Bulan	1.673.100.000	Dinas Sosial	Provinsi
0	0	0	0	0	0	1 paket	80.850.000	Dinas Sosial	Provinsi
1 paket	3.764.999.504	1 paket	5.264.058.521	1 paket	6.675.677.148	5 Paket	20.321.039.849	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 paket	2.268.754.235	1 paket	2.535.399.855	1 paket	2.859.414.896	5 Paket	11.399.000.613	UPT	Wilayah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun-1		Tahun-2	
						Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	Tersedianya jasa pengolahan air limbah	1 paket	1 paket	302.425.000	1 paket	448.040.981
			Rehab Gedung Dinas Sosial	Jumlah gedung dinas sosial yang direhab	0	0	0	1 Dokumen (tahap perencanaan)	80.652.000
			Peningkatan Pengawasan Kinerja Urusan Sosial	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Urusan Sosial	0	0	0	1 Kegiatan	19.470.000
			Pengadaan perlengkapan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Badan Manajemen dan Badan Pembina PPPIJ	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan	49 Orang	49 Orang	4.576.551.574	49 Orang	4.453.165.850
			Peningkatan Kesejahteraan Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan	0	47 Orang	4.456.002.473	31 orang	2.499.566.674
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengelola Bantuan Sosial dan Data Fakir Miskin	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	0	0	0	1 Paket	1.170.672.019
			2. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial	1. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	0	3,1	7.526.794.452	3,15	4.910.311.545
			Pengadaan Mobil Pelayanan Khusus PMKS	Jumlah mobil pelayanan khusus PMKS yang diadakan	0	6 kendaraan	3.144.240.000	6 kendaraan	248.720.000
			Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Tersedianya jasa perizinan KDO/KDO khusus	1 paket	1 paket	144.932.380	1 paket	197.014.965
			Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Tersedianya BBM KDO/KDO khusus	1 paket	1 paket	2.228.483.067	1 paket	2.401.653.553
			Pemeliharaan dan Perawatan KDO/KDO Khusus	Terpelihara dan terawatnya KDO/KDO Khusus	1 paket	1 paket	2.009.139.005	1 paket	2.062.923.027
Total							447.450.569.160		900.426.812.669

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1 paket	484.617.750	1 paket	528.768.325	1 paket	570.111.237	5 Paket	2.333.963.293	UPT	Wilayah
1 Gedung yang direhab	10.000.000.000	0	0	0	0	1 Gedung yang direhab	10.080.652.000	Dinas Sosial	Provinsi
1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	4 Kegiatan	89.470.000	Dinas Sosial	Provinsi
49 Orang	4.453.165.850	49 Orang	4.453.165.850	49 Orang	4.453.165.850	49 Orang	22.389.214.974	PPPIJ	Wilayah
31 orang	2.499.566.674	31 orang	2.499.566.674	31 orang	2.499.566.674	31 orang	14.454.269.169	PMR	Wilayah
1 Paket	1.686.279.248	1 Paket	3.023.091.239	1 Paket	4.253.944.389	4 Paket	10.133.986.895	Dinas Sosial	Provinsi
3,2	4.968.894.719	3,25	5.253.006.619	3,3	5.610.618.153	3,3	28.269.625.488	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
0	0	0	0	0	0	12 kendaraan	3.392.960.000	Dinas Sosial	Provinsi
1 paket	211.276.173	1 paket	224.771.040	1 paket	241.627.068	5 paket	1.019.621.626	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 paket	2.579.220.733	1 paket	2.734.713.346	1 paket	2.944.044.129	5 paket	12.888.114.828	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
1 paket	2.178.397.813	1 paket	2.293.522.233	1 paket	2.424.946.956	5 paket	10.968.929.034	Dinas, Sudin dan UPT	Prov, Kota dan Wilayah
	1.208.687.513.053		1.320.768.118.847		1.452.691.573.619		5.329.945.747.347		

Kami Peduli ... Go !!!

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2022
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	4,8% atau 7.000 Orang	14,9% atau 21.520 Orang	38,7 % atau 55.746 Orang	64,5 % atau 92.851 Orang	75 % atau 107.860 Orang	85,4 % atau 122.899 Orang	85,4 % atau 122.899 Orang
2	Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan	87% atau 276 titik	89% atau 284 titik	92% atau 292 titik	94% atau 300 titik	97% atau 309 titik	100% atau 318 titik	100% atau 318 titik
3	Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	40%	51%	64%	77%	87%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2022
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
4	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2714 Orang	2744 Orang	3194 Orang	3644 Orang	4094 Orang	4545 Orang	4545 Orang
5	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	843 Lembaga	863 Lembaga	883 Lembaga	903 Lembaga	923 Lembaga	943 Lembaga	943 Lembaga
6	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	840 KPM	890 KPM	1475 KPM	2060 KPM	2645 KPM	3230 KPM	3230 KPM
8	indeks kepuasan pelayanan kantor	0 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks
9	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	0 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks

Kami Peduli ... Go !!!

Bab VIII Penutup

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian unit utama dan unit kerja di lingkup Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan 2020 dan akhir periode 5 tahun (2022) dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Sosial.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Galery Foto



Foto 1
Foto Program Penanganan Fakir Miskin



Foto 2
Foto Program Perlindungan Sosial



Foto 3
Foto Program Perlindungan Sosial



Foto 4
Foto Bidang Rehsos



Foto 5
Foto Bidang Rehsos



Foto 6
Foto Bidang Dayasos



Foto 7
Foto Bidang Dayasos

Kami Peduli ... Go !!!

Catatan :

Catatan :



Kami Peduli ... Go !!!



DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl. Gunung Sahari II No. 06
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
www.dinsos.jakarta.go.id